

## PRESS RELEASE

### PELUNCURAN PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024

#### BAWASLU KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

(18 Agustus 2024)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun - Sehari setelah perayaan HUT ke 79 Kemerdekaan RI, pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 Bawaslu Kota Madiun mengadakan kegiatan peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Madiun Jalan Udowo No. 01, Kartoharjo, Kota Madiun. Kegiatan ini dilakukan dengan turut mengundang seluruh jajaran pengawas *AdHoc* dan *Stakeholder*. Pemetaan kerawanan ini merupakan pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Madiun dan dalam rangka untuk tujuan pencegahan dan antisipasi pelanggaran dan sengketa proses untuk Pemilihan tahun 2024 dengan meninjau kembali pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan periode sebelumnya.

Tujuan Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 Kota Madiun adalah untuk memitigasi dan memetakan daerah kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilihan 2024 dan menjadikannya sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 nanti. Pemetaan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan pencegahan serta sebagai bahan koordinasi dengan sesama penyelenggara, yaitu KPU Kota Madiun dan juga *stakeholder* yaitu Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, Media dan Masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Bawaslu Kota Madiun dalam rangka tugas pengawasan, mengawal serta membantu mendorong penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 sehingga berjalan dengan LUBER JURDIL dan dapat berlangsung secara aman, damai dan kondusif.

#### Metode Pemetaan Potensi Kerawanan Pemilihan 2024

Metode pemetaan Pemilihan 2024 adalah Kualitatif Deskriptif. Bawaslu Kota Madiun menyajikan data dan memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap situasi yang terjadi dengan menganalisa hasil pengawasan Bawaslu pada kegiatan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Madiun. Hal ini juga berdasarkan tarik data informasi dari instansi lain, yaitu Polresta Madiun Kota, Bakesbangpol Kota Madiun, Diskominfo Kota Madiun, Media, serta BPBD Kota Madiun.

- Pengumpulan Data : Pengumpulan Data penunjang dilakukan dengan mengumpulkan data milik Bawaslu Kota Madiun serta data milik instansi terkait.
- Analisis Data : Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengecekan data. Pengecekan data ini diperlukan untuk melihat apakah ada kesalahan dalam input data. Setelah data dibersihkan, maka data mulai dianalisa dan pemetaan kerawanan mulai disusun dari data tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, terdapat 7 Indikator/ Potensi Kerawanan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Madiun yaitu seperti dalam tabel berikut :

No.	Isu	IKP 2024		Pemilu 2024	Dampak	Dampak
		Pilkada 2018	Pemilu 2019			
1	Netralitas ASN/TNI/POLRI	√	√		Ringan	Pemberian sanksi etik
2	Adanya gugatan hasil Pemilu	√		√	Sedang	Bisa mengakibatkan turunya partisipasi masyarakat, karena kurang percaya pada penyelenggara
3	Sengketa proses Pemilu	√			Ringan	Mengakibatkan terjadinya diskualifikasi pada peserta pemilu
4	Kampanye diluar jadwal	√			Ringan	Ketidak tertiban dalam pelaksanaan kampanye
5	Adanya pelanggaran pada saat Pemungutan dan perhitungan suara			√	Berat	Potensi Terjadinya pemilihan suara ulang (PSU).
6	Adanya perubahan hasil rekapitulasi suara			√	Berat	Potensi terjadinya Sengketa Hasil di MK
7	Adanya kerusakan alat peraga sosialisasi pada masa pra kampanye			√	Ringan	Potensi Pelanggaran Pidana Umum

Kerawanan tersebut sangat dimungkinkan terjadi hampir di seluruh tahapan, secara khusus terjadi pada Tahapan Pendaftaran, Pra Kampanye dan Kampanye, Tahapan Pemungutan Suara, Tahapan Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Berdasarkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024, perlu adanya strategi pencegahan dan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Madiun berbasis kelembagaan dan berbasis potensi kerawanan pada tahapan Pemilihan Tahun 2024. Langkah antisipasi berbasis kelembagaan yang akan dilakukan Bawaslu Kota Madiun diantaranya dengan melakukan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM), Memperkuat hubungan kelembagaan dengan Stakeholder salah satunya dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Meningkatkan pengawasan partisipatif berbasis kelompok masyarakat dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan sesama penyelenggara pemilu di Kota Madiun. Adapun langkah antisipasi berbasis potensi kerawanan tahapan dengan cara :

1. Melakukan pemetaan kerawanan tiap tahapan,
2. Memberikan imbauan di setiap tahapan,
3. Memberikan saran perbaikan apabila terjadi dugaan pelanggaran dan
4. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif secara massif.

Dari uraian di atas Strategi Pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu Kota Madiun diantaranya melakukan pengawasan melekat, melakukan pengawasan langsung atau tidak langsung, melakukan patroli pengawasan dan membuat posko aduan masyarakat baik *offline* maupun *online*.

--oOo--

(Narahubung : 0857-3501-0480)